



**Judul** : Pengesahan Menunggu Rapim DPR  
**Tanggal** : Minggu, 04 Desember 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 15

# Pengesahan Menunggu Rapim DPR

DPR memastikan persetujuan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI akan disahkan dalam rapat paripurna sebelum 15 Desember 2022.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pengesahan persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI belum masuk agenda Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/12/2022). Namun, DPR memastikan Yudo akan disahkan secepatnya agar tidak melewati masa sidang II tahun 2022 dan tidak terjadi kekosongan jabatan Panglima TNI.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Sabtu (3/12), membenarkan pengesahan Laksamana Yudo belum masuk agenda Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/12). "Surat persetujuan dari Komisi I DPR harus dibawa dulu ke rapim (rapat pimpinan) dan rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk dijadwalkan di rapat paripurna," ujar Dasco.

Ia belum bisa memastikan waktu pelaksanaan rapim dan rapat Bamus untuk memasukkan agenda pengesahan panglima dalam rapat paripurna. Penyebabnya, pimpinan DPR masih akan melihat kecocokan waktu rapim dan rapat Bamus.

Namun, Dasco menekankan, DPR akan segera mengesahkan Panglima TNI sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 berakhir

pada 15 Desember 2022. DPR masih memiliki satu kali jadwal rapat paripurna sebelum rapat paripurna penutupan masa sidang.

"Apa pun kondisinya, pasti Panglima TNI sudah ditetapkan sebelum masa sidang selesai," ucap Dasco.

## Persetujuan

Pada Jumat (2/12), Komisi I DPR menyetujui pengangkatan Yudo Margono sebagai calon panglima setelah rapat dengan pendapat umum beragendakan uji kelayakan dan kepatutan selama tiga jam di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat juga menyepakati pemberhentian dengan hormat Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa.

Anggota Komisi I DPR, Tugbagus Hasanuddin, mengatakan, Komisi I menyerahkan mekanisme selanjutnya kepada pimpinan DPR. Komisi I telah menyerahkan surat persetujuan kepada pimpinan DPR.

Dalam keterangannya sesuai uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI, Jumat, Yudo Margono menjelaskan, peningkatan kualitas personel menjadi prioritas utama apabila dirinya resmi menjabat panglima. Peningkatan kemampuan dan

kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga menjadi fokusnya.

"Yang pertama pasti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komisi I banyak mendorong untuk kesejahteraan prajurit. Selain itu, ada isu Aceh, Papua, Laut China Selatan, dan modernisasi alutsista. Ini akan menjadi referensi untuk tugas saya ke depan," ucap Yudo.

Terkait hal ini, Iis Gindarsah, Koordinator Lab 45, Sabtu, mengatakan, dengan masa jabatan lebih kurang 330 hari, Laksamana Yudo hendaknya berkonsentrasi pada sejumlah isu utama terkait sumber daya manusia di lingkungan TNI. Pertama, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI beserta keluarganya. Kedua, menegakkan disiplin internal melalui pembinaan doktrinal, terutama di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.

Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mengatakan, untuk meningkatkan kemampuan operasi perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, termasuk latihan militer bersama, baik secara bilateral maupun multilateral. (EDN/E06/E15)